

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Thailand selatan sering digambarkan media asing sebagai konflik muslim versus Buddha, yang menjadi agama mayoritas Thailand. Sebagian asumsi itu benar, karena memang penduduk di tiga provinsi selatan Yala, Pattani, dan Narathiwat mayoritas muslim. Tapi akar konflik sebetulnya jauh lebih kompleks. Di provinsi selatan, mayoritas penduduknya adalah Melayu dengan identitas etnisitas yang berbeda dari mayoritas warga Thailand.

Keberadaan umat Muslim di Thailand hanya 5,5% dari jumlah penduduk negara tersebut. Jumlah umat Muslim ini termasuk kecil bila dibandingkan dengan umat Buddha yang menjadi mayoritas penduduk Thailand. Mayoritas dari penduduk Muslim ini berasal dari etnis Melayu dan berada di daerah Thailand Selatan. Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.

Etnis Pattani sebenarnya adalah etnis Melayu yang menempati wilayah Pattani jauh sebelum Thailand menginvasi wilayah ini. Etnis Melayu dikenal sebagai etnis yang halus tutur bahasanya, sopan perilakunya dan sangat toleran baik terhadap sesamanya maupun terhadap etnis lain.

Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, wilayah Pattani menjadi daerah yang merupakan wilayah bangsa Thai yang beragama Budha. Hal didasarkan atas perjanjian penentuan daerah antara Kerajaan Muangthai pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn dengan Pemerintahan Kolonial Inggris di Malaya yang mengharuskan wilayah Patani dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Thailand di tahun 1902. Sebenarnya, masyarakat Muslim di Thailand itu lebih suka bergabung dengan Malaya, sekalipun di bawah pemerintahan Inggris, karena dengan begitu mereka bisa hidup bersama dengan suku-suku bangsa seagama. Di bawah pemerintahan Muangthai yang Buddha, mereka merasa diperlakukan diskriminatif sebagai kelompok minoritas. Birokrasi negara yang berorientasi Thai-Buddhist mengisolasi mereka bukan hanya dari proses politik akan tetapi juga merintangi penduduk Muslim untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Sebab, birokrasi negara rupanya memiliki kekuasaan untuk mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan, untuk disesuaikan dengan kebutuhan integrasi nasional.

Akan tetapi, proses integrasi nasional terhambat karena proses tersebut dinilai sebagai bentuk disintegrasi budaya oleh para penduduk Melayu-Muslim. Berbagai usaha negara ke arah integrasi diterapkan pada penduduk Muslim walaupun pada kenyataannya, penduduk Muslim tersebut tidak menyetujuinya.

Kebijakan represif yang diambil pemerintah Thailand dalam menangani konflik di Pattani membuat pemerintah Thailand mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia. Kebijakan yang diambil pemerintah Thailand dianggap tidak tepat. Sebagai negara tetangga Malaysia merasa prihatin atas langkah-langkah yang diambil pemerintah Thailand dalam menyelesaikan konflik Pattani. Dalam hal ini Malaysia menawarkan langkah-langkah yang dianggap tepat dalam menyelesaikan konflik di Pattani. Tapi tawaran Malaysia justru dianggap sebagai ancaman yang dapat mengancam kedaulatan Thailand.

Berbagai bukti keterlibatan Malaysia di konflik Pattani di beberkan Thailand. Keterlibatan Malaysia yang dianggap ancaman bagi pemerintah Thailand antara lain berupa pernyataan dan bantuan-bantuan yang dianggap pemerintah Thailand sebagai gangguan atas eksistensi dan otoritas pemerintah Thailand di wilayahnya.

Puncaknya pada Kamis, 28 Oktober 2004 Di Kuala Lumpur, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengatakan Malaysia prihatin atas kejadian di Thailand Selatan ini. Dia menawarkan bantuan bila diperlukan demi meredakan konflik antara rakyat dan pihak penguasa daerah setempat. Statement ini dipicu oleh Musibah meninggalnya 84 Muslimin Thailand akibat perlakuan aparat negara yang sewenang-wenang. Bantuan juga sempat diberikan pemerintah Malaysia terhadap beberapa Pengungsi yang meminta suaka di Malaysia. Selain itu, adanya kedekatan dan kesamaan etnis Melayu di Malaysia dan di wilayah Thailand selatan membuat

pemerintah Thailand semakin waspada dengan keterlibatan Malaysia di Thailand Selatan

Ini dibuktikan bahwa Thailand hanya melakukan ancaman, ancaman pemutusan hubungan luar negeri, hingga tindakan yang paling tinggi berupa pemanggilan duta besar Malaysia untuk Thailand yang disertai pernyataan protes oleh terhadap Malaysia. Ancaman-ancaman yang dilancarkan Thailand terhadap Malaysia sebagai bentuk reaksi dari campur tangan Malaysia. Meskipun konfrontasi Thailand terhadap Malaysia hanya sampai pada pemanggilan duta besar yang disertai dengan pernyataan protes yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hubungan diplomatik, tapi pada kenyataannya kebijakan Thailand ini sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan Thailand dan Malaysia.

Dimasa Thaksin Shinawatra, berungkali terjadi ketegangan antara pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia, berbagai media melaporkan hubungan yang tidak harmonis antara kedua negara ini. Tapi pasca kudeta terhadap Thaksin yang kemudian dilanjutkan oleh panglima Surayud Chulanont yang bertugas sebagai perdana menteri Thailand, ketegangan antara kedua negara ini menurun meskipun masih ada beberapa tuduhan keterlibatan Thailand yang dilontarkan pemerintah Thailand. Hingga pada kepemimpinan Abhisit Vejjajiva, ancaman dan tuduhan yang selalu dialamatkan kepada Malaysia justru berubah menjadi bentuk kerjasama. Abhisit Vejjajiva merespon baik apa yang selama ini ditawarkan Malaysia.

Berulang kali terjadi pertemuan dan perbincangan antara kedua negara dalam mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik di wilayah Thailand Selatan.

Ini semakin membuktikan bahwa Hubungan internasional adalah hubungan yang dinamis, Yang sewaktu-waktu dapat berubah. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa hubungan suatu negara dengan negara lainnya dalam keadaan yang baik baik saja, begitupun sebaliknya.